

URAIAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN MONEV PUG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs berfokus kesetaraan dan keadilan gender, yang diidentifikasi sebagai Tujuan 5. Indonesia memiliki beberapa strategi pengarusutamaan gender, tetapi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan untuk diwujudkan nilai. Isu gender adalah isu yang disebabkan oleh perbedaan atau perbedaan gender yang berdampak pada diskriminasi sepihak (perempuan dan laki-laki). Diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam akses dan kontrol atas sumber daya, peluang, status, hak, peran dan penghargaan menciptakan kondisi ketidaksetaraan gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memperkuat kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), namun data menunjukkan masih terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi dan kontrol. dan penggunaan serta pengelolaan sumber daya alam, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan bidang strategis lainnya. Masalah mendasar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang masih kurang memperhatikan pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mewujudkan kesempatan, partisipasi, kontrol dan pencapaian pembangunan.

Pengarusutamaan Gender atau yang sering disingkat dengan istilah PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional, seperti yang termaktub dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000. Inpres tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Upaya pencapaian PUG di Kota Surakarta sudah berjalan lama. Proses PUG sudah dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penguatan terhadap kelembagaan itu sendiri. Keberhasilan PUG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta tergantung pada peran serta

seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan dari PUG itu sendiri, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan, sehingga apa yang sudah dikerjakan sampai saat ini benar-benar berkontribusi terhadap PUG di Kota Surakarta.

Bappeda Kota Surakarta selaku Ketua Pokja PUG dan Koordinator Tim Teknis PUG mempunyai peran dalam rangka penyiapan dan pengembangan kebijakan untuk pembangunan Pengarusutamaan Gender yang berkelanjutan secara periodik melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat dijadikan masukan dan acuan bersama lintas pemangku kepentingan, untuk memastikan PUG di Kota Surakarta dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan Penyusunan Dokumen Monev PUG Kota Surakarta adalah untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan PUG Tahun 2023 di Kota Surakarta. Adapun tujuan Penyusunan Dokumen Monev PUG adalah:

1. Menganalisis kinerja penyelenggaraan PUG sebagaimana tertuang dalam RAD PUG Tahun 2020-2024.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan PUG Tahun 2020-2024.
3. Merumuskan rekomendasi dalam upaya peningkatan pelaksanaan PUG Tahun 2024.

C. Sasaran

Pekerjaan Penyusunan Dokumen Monev PUG Kota Surakarta secara substantif, pembahasan pada kajian melingkupi bidang yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Surakarta. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- a. Mengidentifikasi hasil pelaksanaan PUG Kota Surakarta (Meliputi RAD dan 7 Prasyarat PUG);
- b. Pengumpulan data dan analisis situasi;
- c. Merumuskan hasil monev pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. Merumuskan rekomendasi percepatan pencapaian PUG Kota Surakarta.

D. Keluaran (output)

Output yang diharapkan dari hasil kegiatan Penyusunan Dokumen Monev PUG Kota Surakarta adalah tersusunnya laporan kegiatan dan tersedianya Dokumen Monev PUG Kota Surakarta untuk mendukung Pengarusutamaan Gender Kota Surakarta.

E. Pembiayaan

Anggaran untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Monev PUG Kota Surakarta adalah sebesar **Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)**. Seluruh anggaran dibiayai oleh APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

F. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Monev PUG Kota Surakarta dilaksanakan dan diselesaikan selama 2 (dua) bulan atau 60 hari kalender.
